

## ABSTRAKSI

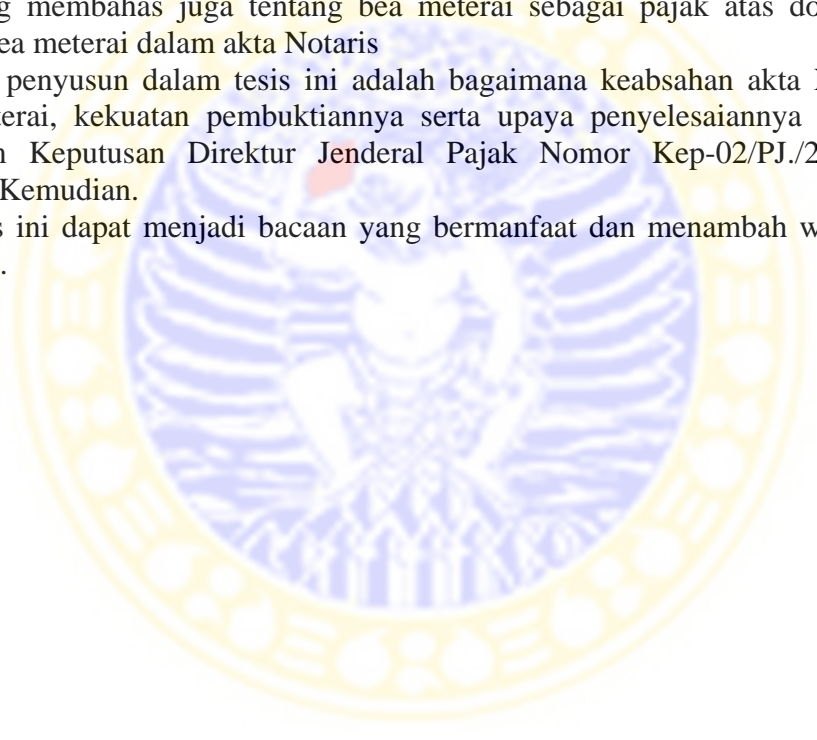
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai bidang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Bea Meterai akta Notaris merupakan salah satu dokumen yang dikenakan bea meterai, hal ini menimbulkan anggapan pada sebagian masyarakat bahwa dengan tidak direkatkannya bea meterai dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum sehingga keabsahan suatu akta selalu dikaitkan dengan adanya bea meterai atau tidak .

Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada bentuk atau anatomi akta Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 38 undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang membahas juga tentang bea meterai sebagai pajak atas dokumen serta kedudukan bea meterai dalam akta Notaris

Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta Notaris yang tidak bermeterai, kekuatan pembuktiannya serta upaya penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ./2003 tentang Pemeteraian Kemudian.

Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya .



## ABSTRACT

Authentic certificate as the strongest evidence and has the important role in various aspects in the society, therefore the necessity about written evidences in authentic certificate more and more increase analogously with the development of certainty law demand in various fields.

Based on the certainty section 2 UU Bea Meterai, Notary Public certificate is one of the documents that is marked by Bea Meterai, it caused the part of society's opinion believe that if an agreement is not marked by Bea Meterai, this certain agreement is not valid in law point of view. Therefore, the validity of a certificate always be linked with the existence of Bea Meterai.

In this thesis, the writer focuses on the form or anatomy of Notary Public certificate like has been stated in section 38 UU Number 30 years 2004 UUN. It also discusses about Bea Meterai as the tax of document and the position of Bea Meterai in Notary Public certificate.

And the target of this thesis is how the validity of unstamped Notary Public certificate does, the power of this evidence and the effort to overcome it based on Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ./2003 about the later stamp giving.

I hope that this thesis bring the advantage of reading and increase the insight to the reader.

